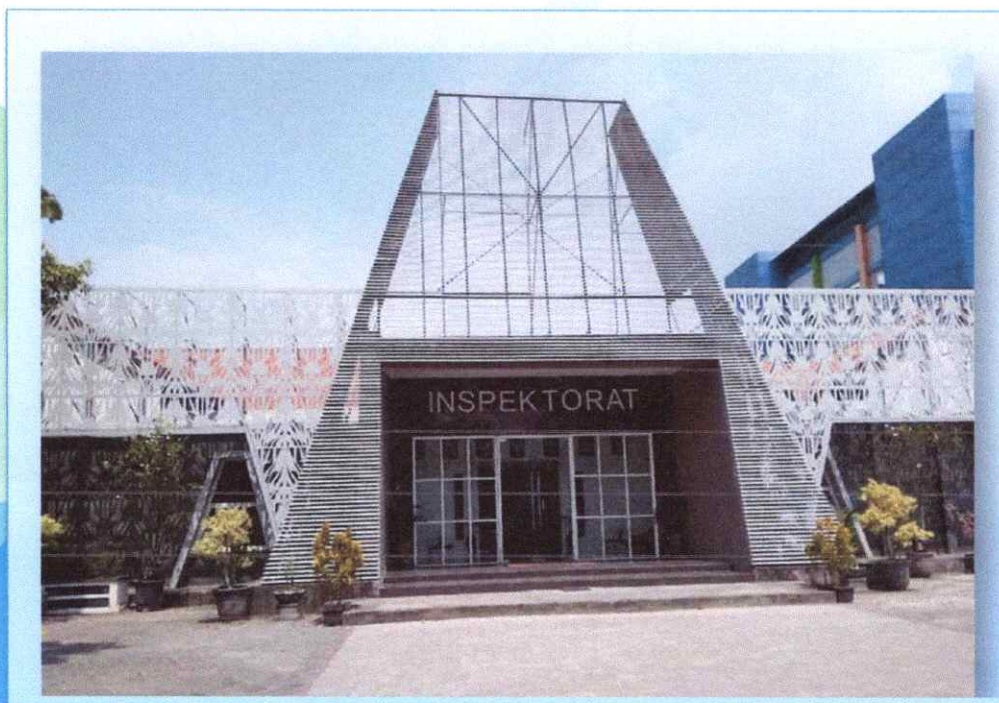




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Basuki Rachmad No.209 Lamongan Kode Pos :62217
Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail :inspektorat@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya karena Inspektorat Kabupaten Lamongan telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 tepat waktu.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama Tahun 2023 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lamongan, semoga laporan ini bermanfaat dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan dan penetapan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Lamongan sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang, dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi sesuai dengan tuntutan serta aspirasi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait.

Lamongan, Januari 2024
INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN
A. FARIKH, S.H., M.M
Pemimpin Muda
NIP. 19670516 199602 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dari Visi Kabupaten Lamongan, Inspektorat Kabupaten Lamongan masuk kedalam Misi yang ke 5 (lima) dan Tujuan ke 1 (satu), yang kemudian untuk mencapai Misi tersebut, diuraikan melalui program dan kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Lamongan, pada Tahun Anggaran 2023 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dan Meningkatnya manajemen Internal Perangkat Daerah dengan 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu:

- A. Kapabilitas APIP pada Tahun 2023 indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu Level 3 dari target Level 3 dengan capaian kinerja 100%.
- B. Manajemen Resiko Indeks pada Tahun 2023 indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 2,983 dari target nilai 2,9 dengan capaian 102,86%.
- C. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) pada Tahun 2023 indikator tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 2,420 dari target 2,0 dengan capaian kinerja 121%.
- D. Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan pada Tahun 2023 indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 91,40 dari target 91,40 dengan capaian kinerja 100%.

Secara keseluruhan indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan tahun 2023 terealisasi lebih dari 100% atau **interpretasi memuaskan**, pada tahun 2023 telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 11.807.797.129 (sebelas milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) secara efektif telah mewujudkan capaian Kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah 95,66%, dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Inspektorat Kabupaten Lamongan perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien dalam

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamongan memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan dan menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Lamongan, Januari 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN



A. FARIKH, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A . Latar Belakang	1
B . Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C Data Umum Organisasi.....	9
1. Personil.....	9
2. Sarana dan Prasarana.....	10
3. Pembiayaan.....	12
D. Sistematika Penyajian LKjIP.....	13
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
1. Visi – Misi.....	16
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	17
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	18
Program dan Kegiatan.....	19
C. Perjanjian kinerja Tahun 2023.....	21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2023.....	38
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja.....	53
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA.....	55
A.4 Analisis penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan 2023.....	59
3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	61

	A.6. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	64
	B. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	65
BAB IV	: PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. FORMULIR RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN 2021-2026.....	72
2. FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2023.....	73
3. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA (KurJa) TAHUN 2023.....	77
4. IKU TAHUN 2023.....	78
5. FORMULIR PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023.....	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berangkat dari pemikiran diatas, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi. Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang telah dirancang dan disusun dalam format Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian didefinitifkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai perencanaan strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023 merupakan laporan ke 2 (dua) dari 5 (lima) tahun perencanaan strategis, dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam melaksanakan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan di tahun yang akan datang.

B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan.

1. Tugas

Inspektorat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknik administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai

tugas ” melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

2. Fungsi

Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Inspektur Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat ;
- b. penetapan dan pengendalian Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. perumusan dan penetapan bahan kebijakan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan desa;
- d. penyelenggaraan pemeriksaan reguler berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT;
- e. penyelenggaraan pengujian terhadap laporan keuangan Perangkat Daerah;
- f. penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah;
- g. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. penyelenggaraan pembinaan tenaga fungsional/pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan review laporan keuangan daerah sebelum dilakukan oleh BPK dan mengoordinasikan dan mereview Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah AKIP/LKjIP Pemerintah Daerah;
- j. penyelenggaraan pengawasan terhadap dana bantuan atas dasar permintaan;

- k. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Inspektorat;
- l. pengendalian dan pengesahan laporan keuangan Inspektorat untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

- 1. Inspektur;
- 2. Sekretariat;
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- 4. Inspektur Pembantu Investigasi;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun masing-masing jabatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. **Sekretariat** yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur dan bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pelayanan administratif dan fungsional di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi umum. Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan;

- c. pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LKjIP, LPPD, LKPJ Inspektorat;
- j. penyeliaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dimana masing-masing bagian tersebut memiliki tugas yang dapat dijelaskan sesuai pasal 9.

2. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LKjIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian program kerja pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya;

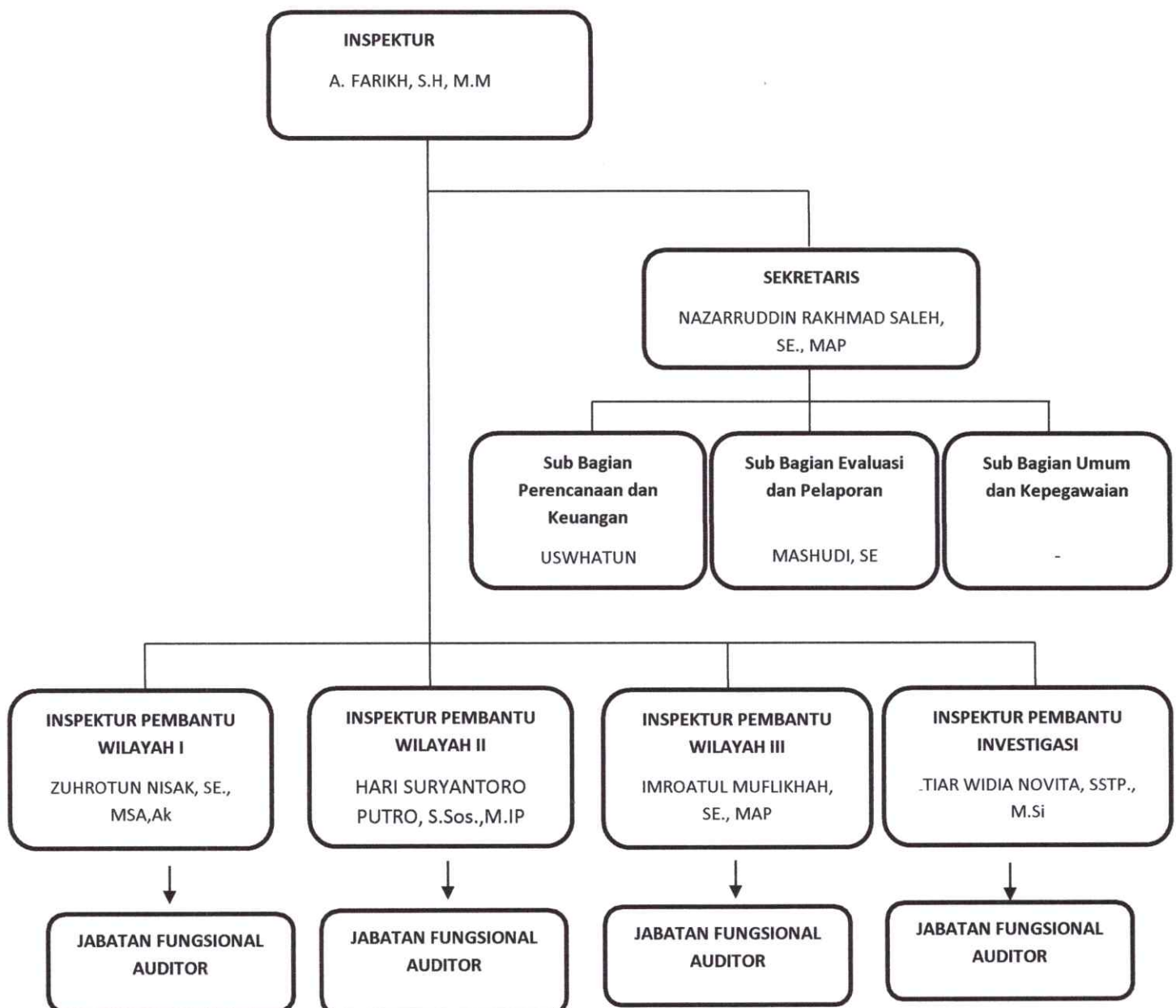
- c. Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - f. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
 - h. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pembinaan dan pengawasan dengan pengawas internal Pemerintah lainnya;
 - i. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan pada masing-masing wilayah kerja;
 - j. Penyelenggaraan analisis dan verifikasi hasil pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - k. Penilaian hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada pimpinan;
 - m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. **Inspektur Pembantu Investigasi** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan pengawasan terkait pencegahan tindak pidana korupsi;

- b. Penyelenggaraan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LKjIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
- c. Penyelenggaraan pengawasan terkait pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. Penyelenggaraan koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi MCP Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan monitoring terhadap pelaksanaan pencapaian dan pengelolaan LHKPN/LHKSAN;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tim saber pungli dan melakukan sosialisasi saber pungli;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan saber pungli;
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan maturitas SPIP Kabupaten Lamongan serta melakukan evaluasi pelaksanaan maturitas SPIP Kabupaten Lamongan;
- j. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- k. Penyelenggaraan monitoring pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi dan penerapan Zona Integritas;
- l. Penyelenggaraan monitoring penerapan Whistle Blowing System;
- m. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu melalui pemeriksaan, pengusutan, pengujian terhadap indikasi tindak pidana korupsi atas penugasan dari pimpinan;
- n. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- o. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan untuk tujuan tertentu dengan pengawas eksternal pemerintah dan Aparat Penegak Hukum;

- p. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN



C . Data Umum Organisasi

1. Personil

Dalam Kegiatan dan tugas di bidang pengawasan didukung sumberdaya manusia, sebagai berikut:

Tabel C.1.
Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan
Serta Jenjang Pendidikan

No.	Jabatan struktural	Jml	Pangkat/Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Ket.
A.	Jabatan Struktural					
1.	Inspektur	1	Pembina Utama Muda /IV-c	1	S-2	
2.	Sekretaris	1	Pembina Tingkat I/IV-a	1	S-2	
3.	Irbanwil	4	Pembina Tingkat I/IV-b	4	S-2	
4.	Ka.sub.Bagian	2	Penata Tingkat I/III-d	1	S-1	
			Pembina /IVa	1	S-2	
5.	Staf	19	Penata /III-c	2	S-2	
			Penata Muda Tk I/III-b	1	S1	
				1	SMA	
			Penata Muda/III-a	9	S1	
				2	SMA	
			Pengatur Tk.I/II-d	1	SMK	
			Pengatur Tk.I/II-c	2	D-3	
			Juru/1c	1	SD	
B.	Jabatan Fungsional 20					
1.	Auditor	5	Auditor Pertama	5	S1	
		11	Auditor Muda	5	S2	
				6	S1	
		4	Auditor Madya	3	S2	
			Auditor Madya	1	S1	
	Jumlah	47		47		

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel C.2

Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Kab. Lamongan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Barang (unit)		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1	-	1
2	Kendaraan Dinas Roda 4	8	-	8
3	Kendaraan Dinas Roda 2	14	-	14
5	Lemari Besi / Metal	2	-	2
5	Rak Besi / Metal	4	-	4
6	Rak Kayu	2	-	2
7	Filing Besi / Metal	12	-	12
8	Filing Plastik	2	-	2
9	Mesin Penghancur Kertas	6	-	6
10	Vacum Cleaner	1	-	1
11	Copy Board / Elektrik White Board	3	-	3
12	Lemari Kayu	1	-	1
14	Meja Tulis	19	-	19
15	Kursi Rapat	75	-	75
16	Kursi Tamu	64	-	64
17	Sofa	9	-	9
18	Meja Tamu	1	-	1
19	Gorden Gordenplis	6	-	6
20	AC Unit	27	-	27
21	Televisi	2	-	2
22	Alat Pemadam / Poratable	1	-	1
23	P.C Unit	29	-	29
24	Lap Top	30	-	30
25	Scanner	14	-	14
26	Printer	54	-	54
27	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
28	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	-	1
29	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	-	8
30	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	45	-	45
31	Meja Pertemuan	6	-	6
32	Meja Rapat di ruang VIP	1	-	1
33	Meja Auditor	20	-	20

34	Meja Kerja Staf	56	-	56
35	Kursi Kerja Staf	19	-	19
36	Meja Rapat Pejabat Eselon III	3	-	3
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	-	2
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	11	-	11
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	45	-	45
40	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	-	12
41	Lemari Arsip	9	-	9
42	Alat studio	1	-	1
43	Speaker Aktif	2	-	2
44	Camera + Attachmen	10	-	10
45	Proyektor	3	-	3
46	Telepon dan Jaringan	5	-	5
47	CCTV	1	-	1
48	Faximile	1	-	1
49	Handy came 7,1 MP	1	-	1
50	Sound Sistem Wirelesss	1	-	1
51	Jalan, irigasi dan jaringan	1	-	1
52	Mesin Absensi (Mesin Pintu)	2	-	2
53	Meja Tambahan (Meja TV (Meja Tambahan))	1	-	1
54	Meja Tambahan (Meja Pertemuan (Meja Tambahan))	7	-	7
55	AC Split (AC Spilt)	8	-	8
56	Standing Breaket TV (Bracket Montorized remote)	1	-	1
57	P.C. Unit (PC. Unit)	2	-	2
58	Lain-lain (Wall Screenn (LAYAR PROYEKTOR 213X213))	1	-	1
59	Printer (Printer)	12	-	12
60	Scanner (Scanner)	5	-	5
61	Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Auditor (Meja Kerja Pegawai Non struktural))	12	-	12
62	Lemari Arsip Untuk arsip Dinamis (Lemari arsip)	3	-	3
63	Proyektor + Attachment (Proyektor WXGA 2700 Lumens)	1	-	1
64	Mesin Akses Control Pintu Selection	1		1
65	Komputer PC	2		2
66	Notebook	4		4
67	Lemari Besi	4		4
68	Lemari Kaca	4		4
69	Proyektor + Attachment	1		1

70	Kursi Kerja Staf	18		18
71	Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	78		78
72	Sound System	1		1
73	Stabilisator	1		1
74	P.C. Unit	3		3
75	Televisi	1		1
76	Audio Portable	1		1
77	Microphone/Wireless Mic	2		2
78	Tripod Camera	1		1
79	(Mainframe) 1 Buah	1		1
80	(CPU) 1 Unit	1		1
81	Proyektor + Attachment	2		2
82	Microphone/Wireless Mic	2		2
83	Tripod Camera	1		1
84	Televisi	1		1
85	Lemari es	1		1
86	Lemari Besi	1		1
87	Briket	1		1
88	Asset Tetap Lainnya	1	-	1
89	Meteran Dorong	1		1
Jumlah		842	-	842

3. Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan sasaran indikator, dengan 3 (tiga) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.11.807.797.129 dan terealisasi sebesar Rp. 11.295.880.731 atau 95,66%, sisa dana sebesar Rp. 511.916.398 atau 4,33%.

1.5 Sistematika Penyajian LKJIP tahun 2023

Laporan Kinerja ini, mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang, dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. BAB I - PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi yang terdiri dari personil, sarana prasarana dan pembiayaan serta sistematika penyajian LKjIP. .

2. BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan Rencana Strategis yang terdiri tujuan, sasaran dan indikator sasaran. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023, Program, Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3. BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi, pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja, perbandingan kinerja sampai akhir periode RPJMD, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional, analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan, analisis efesiensi penggunaan sumberdaya, analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/pencapaian kinerja serta realisasi anggaran.

4. BAB IV - PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan saran langkah-langkah dimasa mendatang yang dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. MATRIK RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN 2021-2026
2. FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2023
3. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA (KurJa) TAHUN 2023
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
5. SK IKU TAHUN 2023

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi aspirasi stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis organisasi.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan Kekuatan (*Strenghts*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Tantangan (*Threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah

Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategis 2021-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala / hambatan yang kemungkinan timbul. Rencana strategik Inspektorat Kabupaten Lamongan 2021-2026 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam BAB ini.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu:

“Terwujudnya Kajayaan Lamongan Yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *Stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Terwujudnya**, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
2. **Kejayaan**, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
3. **Berkeadilan**, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Makna dari visi tersebut adalah dalam kurun 5 tahun mendatang Inspektorat Kabupaten Lamongan diharapkan akan mewujudkan Lamongan Lebih Sejahtera melalui pengawasan yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan didukung aparatur yang jujur dan profesional untuk memberikan motivasi ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

akuntabel dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) Misi, Keterkaitan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah pada Misi ke 5 (lima), yaitu:

“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan

Dalam mewujudkan misi ke 5 (lima) Inspektorat Kabupaten Lamongan masuk dalam Tujuan ke 1 (satu) yaitu **Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa**, dengan sasaran ke 3 (satu) yaitu **“Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal”** dengan indikator **Maturitas SPIP**, dari sasaran RPJMD tersebut tujuan yang ingin dicapai organisasi adalah target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan dan indikator Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tujuan	Indikator
Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan”.	Maturitas SPIP

Sasaran

Dari tujuan tersebut Inspektorat mempunyai 2(dua) sasaran yang merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis, Sasaran-sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan dan indikatornya sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat	Kapabilitas APIP
	Manajemen Resiko Indeks
	Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi
Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk tahun 2023 diturunkan dari Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat untuk tahun 2023, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal Tahun 2023.

Komponen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang

harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan memiliki kriteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, layak dicapai, serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tertentu. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Indikator outcome yang ditetapkan lebih merupakan indikator yang bersifat immediate outcome yang akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator output ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan.

Berikut akan disampaikan mengenai rencana kinerja tahun 2023 baik berupa sasaran berserta indikator kinerja serta program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, sebagaimana pada lampiran 2.

Program dan Kegiatan

Sebagaimana Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021 – 2026, maka Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan:

- 1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, melalui kegiatan:

- 1). Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- 2). Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, melalui Kegiatan:

- 1). Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- 2). Pendampingan dan Asistensi.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kabupaten Lamongan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2023 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dapat digambarkan pada Tabel di Bawah ini :

Tabel C.1
Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	Level 3
		Manajemen Resiko Indeks	2,9
		Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	2,0
2.	Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat	91.40

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD yang digunakan untuk melaksanakan dengan 3 (tiga) program kegiatan, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.11.807.797.129,- dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

Tabel C.2
Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	INSPEKTORAT	11.807.797.129
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,942,647,003
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000
A.	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	30,000,000
B.	Evaluasi Kinerja PD	20,000,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,600,205,803
A.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,560,205,803
B.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	20,000,000

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
C.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD	20,000,000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284,073,600
A.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41,250,000
B.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	242,823,600
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268,475,500
A.	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor	12,003,000
B.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.256.600
C.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000.000
D.	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	60,000,000
E.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.000.000
F.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103,215,900
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539,866,000
A.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,750,000
B.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	175,076,000
C.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361,040,000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,026,100
A.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26,897,000
B.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	63,129,100
C.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000
D.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98,000,000
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	352.655.026
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	297,319,870
A.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14,858,450

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
B.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26,466,500
C.	Reviu Laporan Kinerja	14,742,750
D.	Reviu Laporan Keuangan	21,826,500
E.	Pengawasan Desa	191,205,170
F.	Kerjasama Pengawasan Internal	8,380,000
G.	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	19,840,500
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	55,335,156
A.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27,910,600
B.	Pengawasan dengan tujuan tertentu	27,424,556
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	512.495.100
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	16,419,100
A.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-
B.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	16,419,100
2	Pendampingan dan Asistensi	496,076,000
A.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	47,703,200
B.	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	36,090,400
C.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	168,961,000
D.	Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	243,321,400

Catatan:

	Program
	Kegiatan

Tabel C.3

Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola perencanaan, administrasi Keuangan, kepegawaian dan asset Inspektorat	Nilai SKM Inspektorat	84,00
2.	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	95%
3.	Meningkatnya tindak lanjut hasil Pengawasan Eksternal	Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK yang ditindaklanjuti	88%

Indikator kinerja Individu Sekretaris pada Inspektorat Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) indikator antara lain:

1. Nilai SKM Inspektorat di ukur dari hasil survey kepuasan masyarakat/perangkat daerah oleh pihak ke tiga yaitu PT Sucofindo Cabang Utama Surabaya.
2. Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti di ukur dari Jumlah Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai dibagi Jumlah Rekomendasi APIP dikali 100%
3. Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK yang ditindaklanjuti di ukur dari Jumlah Tindaklanjut Rekomendasi BPK-RI selesai dibagi Jumlah Rekomendasi BPK dikali 100%

Sasaran tersebut di dukung oleh 7 (tujuh) kegiatan yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh) sub kegiatan, sebagaimana pada Tabel di bawah ini :

Tabel C.4
Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Sekretaris Pada Inspektorat
Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,600,205,803
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284,073,600
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	268,475,500
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539,866,000
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,026,100
7.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	297,319,870

Tabel C.5

Perjanjian Kinerja Irbanwil I pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	95%
2	Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah I dan meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah I	95%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah I	95%
3.	Terwujudnya Pendampingan, tindak lanjut rekomendasi TP-TGR	Persentase Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti	90%

	APIP dan BPK RI	Persentase Rekomendasi TP-TGR Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	80%
--	-----------------	--	-----

Indikator kinerja Individu Irbanwil I pada Inspektorat Tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) indikator antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan, yang diukur dari pelaksanaan program pengawasan yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal rencana pengawasan
2. Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah I, diukur dari Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan sesuai berakhirnya dengan Surat Tugasnya
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah I, diukur dari TLHP selesai dari Irbanwil I
4. Persentase Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti, diukur dari Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi dikali 100.
5. Persentase Rekomendasi TP-TGR APIP yang ditindaklanjuti, diukur dari Rekomendasi TP-TGR APIP I yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi dikali 100

Tabel C.6
Perjanjian Kinerja Irbanwil II pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	95%
2.	Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah II dan meningkatnya tindak lanjut hasil	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah II	95%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada	95%

	pengawasan APIP	wilayah II	
3.	Terwujudnya pendampingan BPKP Perwakilan Prov. Jatim	Jumlah Laporan Pendampingan	1 Laporan

Indikator kinerja Individu Irbanwil II pada Inspektorat Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) indikator antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan, yang diukur dari pelaksanaan program pengawasan yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal rencana pengawasan
2. Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah II, diukur dari Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan sesuai berakhirnya dengan Surat Tugasnya
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah II, diukur dari TLHP selesai dari Irbanwil II
4. Jumlah Laporan Pendampingan, diukur laporan pendampingan BPKP Perwakilan Prov. Jatim.

Tabel C.7
Perjanjian Kinerja Irbanwil III pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	95%
2	Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah III dan meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah III	95%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah III	95%

3.	Terwujudnya pendampingan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Persentase Rekomendasi Pemeriksaan Inspektorat Prov Jatim yang ditindaklanjuti	90%
----	--	--	-----

Indikator kinerja Individu Irbanwil III pada Inspektorat Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) indikator antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan, yang diukur dari pelaksanaan program pengawasan yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal rencana pengawasan
2. Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah III, diukur dari Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan sesuai berakhirnya dengan Surat Tugasnya
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah III, diukur dari TLHP selesai dari Irbanwil III.
4. Jumlah Laporan Pendampingan tepat waktu, diukur laporan pendampingan pendampingan Inspektorat Provinsi Jawa timur.

Tabel C.8

Perjanjian Kinerja Irban Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan pada wilayah Investigasi	95%
2	Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah Investigasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah Investigasi	95%
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang di	80%

		tindaklanjuti pada wilayah Investigasi	
3	Meningkatnya perumusan kebijakan yang di legalitaskan	Persentase kebijakan yang dilegalitaskan	90%

Indikator kinerja Individu Irban Investigasi pada Inspektorat Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) indikator antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan, dimana yang diukur dari pelaksanaan program pengawasan yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal rencana pengawasan
2. Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah Irban Investigasi, diukur dari Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan sesuai berakhirnya dengan Surat Tugasnya
3. Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti pada wilayah Irban investigasi, diukur dari pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sampai selesai.
4. Persentase kebijakan yang dilegalitaskan, diukur dari kebijakan yang di legalkan di bagi dengan draf kebijakan yang diajukan di kali 100

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023, Irban Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 540.405.700 yang digunakan untuk melaksanakan dengan 3 (tiga) Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel C.9
Program Yang Mendukung Sasaran Irban Investigasi
pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN Rp	KET
1.	Kegiatan Penanganan Kerugian Negara/Daerah	27.910.600	APBD
2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	16.419.100	APBD
3.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	496.076.000	APBD
	JUMLAH	540.405.700	APBD

Tabel C.10
Perjanjian Kinerja Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kepegawaian	12 Laporan
2.	Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan persediaan barang	12 Laporan
3.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	100%
4.	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang	12 Laporan

Dalam mendukung tugas dan fungsi Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian memiliki Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi 4 (empat) sasaran dan memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu:

1. Jumlah Laporan kepegawaian, di ukur dari jumlah laporan kepegawaian yang selesai tepat waktu.
2. Jumlah Laporan persediaan barang, di ukur dari jumlah persediaan barang yang selesai tepat waktu.
3. Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik, diukur jumlah pelayanan yang tersedia dengan baik di bagi jumlah pelayanan yang ada di kali 100
4. Jumlah laporan pemeliharaan barang, di ukur dari jumlah laporan pemeliharaan barang yang selesai tepat waktu.

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2023, Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar

Rp.1.292.441.200,00 yang digunakan untuk melaksanakan dengan 15 (lima belas) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel C.11

**Kegiatan yang mendukung Sasaran Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada
Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	KET
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.250.000	APBD
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	242.823.600	APBD
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.003.000	APBD
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.256.600	APBD
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	APBD
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000	APBD
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.215.900	APBD
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.076.000	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.040.000	APBD
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.897.000	APBD
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.129.100	APBD

14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	APBD
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.000.000	APBD
	JUMLAH	1.292.441.200	APBD

Tabel C.12
Perjanjian Kinerja Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Program Kerja dan Bahan Koordinasi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Program Kerja yang tersedia	1 Dokumen
2.	Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	180 Laporan
3.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	20 Laporan

Dalam mendukung tugas dan fungsi Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu:

1. Jumlah program kerja, yang di ukur dengan Jumlah dokumen program kerja yang tersusun

2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan, diukur dari laporan hasil pemeriksaan selesai tepat waktu dan resume tindaklanjut hasil pemeriksaan.
3. Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu diukur dari laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu selesai tepat waktu

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2023, Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 324.744.426 yang digunakan untuk melaksanakan dengan 8 (delapan) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel C.13

**Kegiatan yang mendukung sasaran Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada
Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	KET
1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14.858.450	APBD
2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26.466.500	APBD
3.	Reviu Laporan Kinerja	14.742.750	APBD
4.	Reviu Laporan Keuangan	21.826.500	APBD
5.	Pengawasan Desa	191.205.170	APBD
6.	Kerjasama Pengawasan Internal	8.380.000	APBD
7.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	19.840.500	APBD
8.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	27.424.556	APBD
	JUMLAH	324.744.426	APBD

Tabel C.14

Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Perencanaan dan Kinerja	Jumlah Dokumen perencanaan, dan evaluasi Kinerja	8 Dokumen
2.	Terlaksananya tatakelola Keuangan yang baik	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan

Dalam mendukung tugas dan fungsi Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu:

1. Jumlah Dokumen Perencanaan, di ukur dari jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu. Dan Jumlah dokumen evaluasi kinerja, di ukur dari jumlah dokumen evaluasi kinerja yang selesai tepat waktu.
2. Jumlah Laporan Keuangan, di ukur dari jumlah Laporan Keuangan yang selesai tepat waktu.

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2023, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 9.650.205.803,00 yang digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel C.15

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	KET
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.560.205.803	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	APBD
	Jumlah	9.650.205.803	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Lamongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023, sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kabupaten Lamongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan tanggal 27 Januari 2023 Nomor : 188/ 05 /Kep/413.201/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

A. 1 Pencapaian Kinerja

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Lamongan melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Lamongan tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

TABEL A.1.1
PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2023
PADA INSPEKTORAT KAB. LAMONGAN

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%

Dari Tabel diatas pada tahun 2023, indikator Kinerja adalah Maturitas SPIP tercapai dengan kategori sangat berhasil yaitu Level 3 dari target Level 3 dengan capaian kinerja 100%. Keberhasilan indikator ini dikarenakan kerjasama Perangkat Daerah dalam pemenuhan dokumen pendukung SPIP pada Aplikasi SPIP serta pendampingan Perangkat Daerah yang dilakukan APIP pada Perangkat Daerah, dalam pemenuhan data pendukung. Inovasi yang mendukung peningkatan SPIP dengan penguatan Manajemen Risiko Index (MRI) melalui aplikasi Simario, Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan korupsi (IEPK) melalui pelaporan budaya anti korupsi Perangkat Daerah dengan aplikasi Laporan WBS dan peningkatan Kapabilitas APIP melalui Diklat Fungsional, Diklat Teknis Substansi dan Bimtek Pengawasan. Sedangkan capaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

TABEL A.1.2
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
PADA INSPEKTORAT KAB. LAMONGAN

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%
	Manajemen Resiko Indeks	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,9	2,983	102,86%
	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	12,0	2,420	121%
Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat Kab. Lamongan	91,40	91,40	100%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- a. Kapabilitas APIP, indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu Level 3 dari target Level 3 dengan capaian kinerja 100%. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, keberhasilan ini dikarenakan APIP mengupdate data pendukung Kapabilitas APIP pada Aplikasi serta pendampingan dari BPKP Provinsi Jawa Timur.
- b. Manajemen Resiko Indeks, indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 2,983 dari target 2,9 Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal keberhasilan ini dikarenakan OPD memenuhi data pendukung pada aplikasi SPIP, serta pendampingan dari APIP. Penguatan Manajemen Risiko Indek (MRI) melalui aplikasi Simario.
- c. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 2,420 dari target 2,0 dengan capaian kinerja 121%. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang

Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi, keberhasilan ini dikarenakan APIP mengupdate data pendukung SPIP pada Aplikasi SPIP,) pelaporan budaya anti korupsi Perangkat Daerah dengan aplikasi Lapor WBS serta pendampingan dari BPKP Provinsi Jawa Timur.

- d. Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan, indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai **91,40 dari target 91.40** dengan capaian kinerja 1000%. Indikator ini didukung oleh 6 (enam) Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Penggaran dan Evaluasi, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, keberhasilan ini dikarenakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi telah terinventarisasi, dan capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan.

TABEL A.1.3
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEJABAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Sekretaris	Meningkatnya tata kelola perencanaan, administrasi Keuangan, kepegawaian dan asset Inspektorat	Nilai SKM Inspektorat	84,00	84,66	100,78				
		Jumlah Dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi	8	8	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	49,869,000	99,74
		Jumlah laporan keuangan	12	12	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,600,205,803	9,115,506,909	94,95
		Jumlah laporan kepegawaian	12	12	100%	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284,073,600	283,169,576	99,68
		Jumlah Laporan persediaan barang dan jasa	12	12	100%	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	268,475,500	267,587,730	99,67
		Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	100%	100%	100%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539,866,000	520,346,056	96,38
		Jumlah laporan pemeliharaan barang	12	12	100%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	200,026,100	199,753,400	99,86

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	95%	97,52	102,65	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	284,914,870	283,538,160	99.52
	Meningkatnya tindak lanjut hasil Pengawasan Eksternal	Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK yang ditindaklanjuti	88%	92,45	105,06	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12,405,000	12,405,000	100
Urban wil 1	Tersusunnya Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	95%	100%	105,26%				
	Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah I dan meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah I	95%	100%	105,26%				
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah I	95%	100%	105,26%				

	APIP								
	Terwujudnya Pendampingan, tindak lanjut rekomendasi TP-TGR APIP dan BPK RI	Persentase Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti	90%	92,45%	102,72%				
		Persentase Rekomendasi TP-TGR Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%				
Irbn Wil II	Tersusunnya Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	95%	100%	105,26%				
	Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah II dan memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah II	95%	100%	105,26%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	103.333.000	91.722.045	88,76%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti pada wilayah II	95%	100%	105,26%				

	Terwujudnya pendampingan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur	Jumlah Laporan Pendampingan	1 Laporan	1 Laporan	100%				
Irbab Wil 3	Tersusunnya dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu pada wilayahnya	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	95%	100%	105,26%				
	Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah III dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah III	95%	100%	105,26%				
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selesai pada wilayah III	95%	100%	105,26%				

	Terwujudnya pendampingan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Persentase Rekomendasi Pemeriksaan Inspektorat Prov Jatim yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%				
Urban Investigasi	Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan pada wilayah Investigasi	95%	100%	105,26%				
	Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah Investigasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah Investigasi	95%	100%	105,26%				
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti pada wilayah Investigasi	80%	100%	125%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	27.910.600	27,475,000	98,44
	Meningkatnya perumusan kebijakan yang di	Persentase kebijakan yang dilegalitaskan	90%	100%	111,11%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	16.419.100	16,418,300	100

	legalitaskan					Pengawasan			
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi	35 OPD	35 OPD	100%	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	496.076.000	493,479,350	99,48
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tersusunnya Perencanaan dan Kinerja	Jumlah Dokumen perencanaan, dan evaluasi Kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen	100%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	30,000,000	29,869,000	99,56
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terbit tepat waktu	4 Laporan	4 Laporan	100%	Evaluasi Kinerja PD	20,000,000	20,000,000	100
	Terlaksananya tatakelola Keuangan yang baik	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	47 Orang	95,91%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,560,205,803	9,075,704,359	94,93
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Laporan	3 Laporan	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	20,000,000	19,866,700	99,33

		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Keuangan Akhir Tahun OPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	20,000,000	19,935,850	99,68
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersusunnya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	100%				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	66	66	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41,250,000	41,052,000	99,52
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66	64	97%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	242,823,600	242,117,576	99,71

	Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan persediaan barang	12 Laporan	12 Laporan	100%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor	12,003,000	11,718,300	97,63
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.256.600	30.005.000	99,17
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000.000	49.944.000	99,89
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	60,000,000	59.896.250	99,83
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.000.000	12.980.000	99,85
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 Laporan	84 Laporan	168%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103,215,900	103.044.180	99,83

		SKPD							
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	100%	100%	100%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	44 Laporan	88%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,750,000	3,374,000	89,97
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	175,076,000	160,277,006	91,55
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361,040,000	356,695,050	98.80
	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang	12 Laporan	12 Laporan	100%				

		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.00	1	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26,897,000	26,701,400	99,27
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21.00	23	109,52%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	63,129,100	63,082,000	99,93
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000	12,000,000	100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100%	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98,000,000	97,970,000	99,97
Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Program Kerja dan Bahan Koordinasi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Program Kerja yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
	Meningkatnya	Jumlah Laporan Hasil	180 Laporan	226 Laporan	125,55%				

	ketepatan waktu penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan							
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	3 Laporan	300%	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14,858,450	14,310,000	96,31
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26,466,500	26,220,500	99,07
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	64 Laporan	67 Laporan	104,68%	Reviu Laporan Kinerja	14,742,750	14,736,350	99,96
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	48 Laporan	48 Laporan	100%	Reviu Laporan Keuangan	21,826,500	21,804,900	99,90
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Pengawasan Desa	54 Laporan	108 Laporan	200%	Pengawasan Desa	191,205,170	191,114,010	99,35
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	100%	Kerjasama Pengawasan Internal	8,380,000	8,010,000	95,58

		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	19,840,500	19,747,400	99,53
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	20 Laporan	29 Laporan	145%	Pengawasan dengan tujuan tertentu	27,424,556	26,332,250	96,02

Sumber Data: - Laporan Keuangan

- Penetapan hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Adapun perbandingan capaian kinerja utama tahun ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel A.2.1

Tabel A.2.1

Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Satuan	Baseline 2020	Tahun 2022			Tahun 2023			PD Yang Menangani Urusan
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	100%	3	3	100%	Inspektorat
	Manajemen Resiko Indeks	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	1	1,2	2,825	235,4%	2,9	2,983	102,86%	
	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	1,5	1,7	2,000	117,65%	2,0	2,420	121%	
Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inpektorat Kab. Lamongan	Nilai	89,0	89,10	91,36	102,5%	91,40	91,40	100%	

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Kapabilitas APIP, indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu Level 3 dari target Level 3 dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 pencapaian kinerja sama memperoleh 100%.
2. Manajemen Resiko Indeks, indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 2,983 dari target 2,9 Indikator dengan capaian kinerja 102,86%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 pencapaian kinerja Tahun 2023 lebih kecil dikarenakan target kinerjanya tahun 2023 lebih besar.
3. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 2,420 dari target 2,0 dengan capaian kinerja 121%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 pencapaian kinerja tahun 2023 lebih besar.
4. Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan, indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 91,40 dari target 91,40 dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 pencapaian kinerja tahun 2023 lebih besar.

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Untuk melaksanakan Misi **Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa**, Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri.

Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal” dengan indikator Maturitas SPIP. Sehingga tujuan dari Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah **“Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan”**.

Untuk mendukung tugas pelayanan tersebut, perlu didukung dengan keberadaan pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang baik dalam hal manajemen pengelolaannya dan bersih dari sisi pelaksana aparturnya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

Tabel.A.3.1
Tujuan dan Indikator

No.	Tujuan	Indikator	Formula Indikator	satuan	Baseline Tahun 2020	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.	Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%

Dari Tabel diatas pada Tahun 2023 indikator Nilai Maturitas SPIP Kabupaten terealisasi level 3 dari target level 3, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2022, sama-sama tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 yaitu Level 4 belum tercapai.

Tabel. A. 3.2
Sasaran dan Indikatornya

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Satuan	Baseline 2020	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2022			PD Yang Menangani Urusan
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	Inspektorat
	Manajemen Resiko Indeks	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	1	1	3,038	303,8%	1,2	2,825	235,4%	2,9	2,983	102,86%	
	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	1,5	1,5	1,824	121,6%	1,7	2,000	117,65%	2,0	2,420	121%	
Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inpektorat Kab. Lamongan	Nilai	89,0	89,0	90,57	101,70%	89,10	91,36	102,5%	91,40	91,40	100%	

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- A. Kapabilitas APIP pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu Level 3 dari target Level 3 dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 yaitu Level 3 sudah tercapai.
- B. Manajemen Resiko Indeks pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil dengan capaian kinerja diatas 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 yaitu Level 2,0 sudah tercapai pada Tahun 2022. Oleh sebab itu pada tahun 2023 target kinerja di naikan melebihi target renstra.
- C. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 indikator tercapai dengan katagori sangat berhasil dengan capaian kinerja diatas 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 yaitu Level 2,5 belum tercapai.
- D. Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil dengan capaian kinerja diatas 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 yaitu 89,50 sudah tercapai pada Tahun 2021. Oleh sebab itu pada tahun 2023 target kinerja di naikan melebihi target renstra.

A.4 Analisis penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan 2023

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan tahun 2021-

2026 serta analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
------------------	---

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Kapabilitas APIP, Manajemen Resiko Indeks dan Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dimana dalam upaya pencapaian didukung oleh 5 (lima) Arah Kebijakan, 2 (dua) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan dengan 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
Manajemen Resiko Indeks	Nilai	2,9	2,983	102,86%
Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	2,0	2,420	121%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Kapabilitas APIP, indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu Level 3 dari target Level 3 dengan capaian kinerja 100%. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, keberhasilan ini dikarenakan APIP mengupdate data pendukung Kapabilitas APIP pada Aplikasi serta pendampingan dari BPKP Provinsi Jawa Timur.
2. Manajemen Resiko Indeks, indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu nilai 2,983 dari target 2,9 dengan capaian kinerja 102,86%. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal keberhasilan ini dikarenakan OPD memenuhi data pendukung pada aplikasi SPIP, serta pendampingan dari APIP. Penguatan Manajemen Risiko Indek (MRI) melalui aplikasi Simario.

3. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu nilai 2,420 dari target 2,0 dengan capaian kinerja 121%. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi, keberhasilan ini dikarenakan APIP mengupdate data pendukung SPIP pada Aplikasi SPIP,) pelaporan budaya anti korupsi Perangkat Daerah dengan aplikasi Lapor WBS serta pendampingan dari BPKP Provinsi Jawa Timur.

SASARAN 2**Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah**

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Lamongan dimana dalam upaya pencapaian didukung oleh 3 (tiga) Arah Kebijakan, 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan, indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai **91,36 dari target 91,40** dengan capaian kinerja **102,5%**. Apabila dibandingkan dengan Capaian tahun **2022** ada kenaikan nilai sebesar **0,79**. Indikator ini didukung oleh 6 (enam) Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Penggaran dan Evaluasi, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, keberhasilan ini dikarenakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi telah terinventarisasi, dan capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan

A. 5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (SDM, Dana dan Sarana dan Prasarana)

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam mengawal penyelenggaraan pengawasan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan antara lain pemenuhan kecukupan auditor untuk melaksanakan tugas pengawasan sekurang-

kurangnya 41 Auditor mengingat luasnya jangkauan wilayah pengawasan dan banyaknya jumlah Obyek Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan, akan tetapi hingga saat ini masih berjumlah 28 orang, sehingga masih terdapat kekurangan auditor sebanyak 13 orang.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 11.807.797.129 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 11.295.880.731 atau 95,66%, sisa dana sebesar Rp. 511.916.398 atau 4,33%, yang merupakan SILPA di Kas Daerah. Adapun alokasi per sasaran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

TABEL. A. 5.1
ALOKASI PER SASARAN

NO.	Sasaran	Indikator	Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	352.655.026	349.750.410	99,18
		Manajemen Resiko Indeks	29.601.200	29.046.350	98,13
		Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	609.769.200	509.897.650	99,49
2.	Meningkatnya manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	10.942.647.003	10.414.848.671	95,18

TABEL. A.5.2
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	% EFESIENSI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	100	99,18	0,82
		Manajemen Resiko Indeks	102,86	98,13	4,73
		Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	121	99,49	21,51
2.	Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat	100%	95,18	4,82

Dari Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan pada Tahun 2023.

A.6. Analisa Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang di breakdown ke dalam 2 (dua) Program dengan 4 (empat) kegiatan dan 1 (satu) Program Penunjang dengan 6 (enam) kegiatan, semuanya merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan serta indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Penyesuaian Indikator Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator yaitu; Kapabilitas APiP, Manajemen Resiko Indeks dan Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi, di mana program dan kegiatan tersebut bersumber dari Program Nasional serta mengacu pada kaedah-kaedah perencanaan kegiatan. Dalam mencapai keberhasilan tersebut Inspektorat Kabupaten Lamongan menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengawasan antara lain :

1. Semakin banyaknya mandatory baik dari KPK, Pemerintah Pusat dan BPKP;
2. Kurang kooperatifnya Perangkat Daerah pada saat pemeriksaan
3. Kurangnya kuantitas Auditor mengingat luas wilayah dan banyaknya obyek Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan;
4. Kurang maksimalnya kualitas SDM Auditor akibat terbatasnya anggaran untuk bimtek maupun diklat Auditor;
5. Kurangnya staf operasional.

Solusi

1. Diupayakan meningkatkan kualitas SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan melalui pembinaan dan motivasi agar terus meningkatkan kompetensinya, sering membaca dan memahami ketentuan perundang-undangan, mengikuti workshop, seminar, bimtek, pelatihan uji kompetensi sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan professional. Selain itu juga mengupayakan penambahan personil APIP maupun staf operasional, baik melalui perekrutan CPNS maupun pelimpahan jabatan.
2. Menyusun Peraturan Bupati Lamongan terkait tindaklanjut hasil pengawasan, agar Perangkat Daerah bertanggung jawab atas rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lamongan.
3. Melakukan evaluasi dan ekspos Manajemen Risiko ke BPKP Pusat
4. Meningkatkan pendampingan SPIP dan Kapabilitas APIP dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan semua pihak diharapkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan lebih optimal.

B. Realisasi Anggaran 2023

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome.

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan sasaran indikator, dengan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 11.807.797.129 dan terealisasi sebesar Rp. 11.295.880.731 atau 95,66%, sisa dana sebesar Rp. 511.916.398 atau 4,33%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.1
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	INSPEKTORAT	11.807.797.129	11.295.880.731	95,66
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,942,647,003	10.436.232.671	95,37
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	49,869,000	99,74
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	30,000,000	29,869,000	99,56
	Evaluasi Kinerja PD	20,000,000	20,000,000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,600,205,803	9,115,506,909	94,95
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,560,205,803	9,075,704,359	94,93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	20,000,000	19,866,700	99,33
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD	20,000,000	19,935,850	99,68
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284,073,600	283,169,576	99,68
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41,250,000	41,052,000	99,52
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	242,823,600	242,117,576	99,71

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268,475,500	267,587,730	99,67
	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor	12,003,000	11,718,300	97,63
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.256.600	30.005.000	99,17
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000.000	49.944.000	99,89
	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	60,000,000	59.896.250	99,83
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.000.000	12.980.000	99,85
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103,215,900	103.044.180	99,83
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539,866,000	520,346,056	96,38
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,750,000	3,374,000	89,97
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	175,076,000	160,277,006	91,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361,040,000	356,695,050	98.80
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,026,100	199,753,400	99,86
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26,897,000	26,701,400	99,27

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	63,129,100	63,082,000	99,93
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000	12,000,000	100
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98,000,000	97,970,000	99,97
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	352.655.026	349.750.410	99,20
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	297,319,870	295,943,160	99,54
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14,858,450	14,310,000	96,31
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26,466,500	26,220,500	99,07
	Reviu Laporan Kinerja	14,742,750	14,736,350	99,96
	Reviu Laporan Keuangan	21,826,500	21,804,900	99,90
	Pengawasan Desa	191,205,170	191,114,010	99,35
	Kerjasama Pengawasan Internal	8,380,000	8,010,000	95,58
	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	19,840,500	19,747,400	99,53
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	55,335,156	53,807,250	97,24
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27,910,600	27,475,000	98,44
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	27,424,556	26,332,250	96,02
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	512.495.100	509.897.650	99,49

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	16,419,100	16,418,300	100
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	16,419,100	16,418,300	100
2	Pendampingan dan Asistensi	496,076,000	493,479,350	99,48
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	47,703,200	47,283,000	99,12
	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	36,090,400	35,166,750	97,44
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	168,961,000	167,814,500	99,32
	Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	243,321,400	243,215,100	99,96

Catatan:

	Program
	Kegiatan

BAB IV

P E N U T U P

B.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Lamongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran dengan indikator Kapabilitas APiP, Manajemen Resiko Indeks dan Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dengan nilai capaian lebih dari 100% atau interpretasi memuaskan.

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan sasaran indikator, dengan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.807.797.129 dan terealisasi sebesar Rp. 11.295.880.731 atau 95,66%, sisa dana sebesar Rp. 511.916.398 atau 4,33%,

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah 95,66% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal di sebabkan sesuai dengan peraturan presiden tentang anggaran APIP yang sebesar 0,5% dari APBD, sehingga pagu indikatif bertambah setiap tahunnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lamongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lamongan.

a. Saran

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian Kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan tentunya perencanaan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan sumberdaya manusia (baik kualitas dan kuantitas), sarana dan prasarana, serta program kerja yang baik harus lebih ditingkatkan lagi.

Lamongan, Januari 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN


A. FARIKH, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

MATRIK RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2026

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan

MISI : “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”

SASARAN : Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal”

TUJUAN PD : Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Kondisi Awal Kinerja	Target Tujuan, Sasaran Tahun Ke-					Kondisi akhir
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan	-	Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
2		Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat	Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3			Manajemen Resiko Indeks	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,0
4			Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,5	2,5
5		Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inpektorat Kab. Lamongan	89,00 (A)	89,10 (A)	89,20	89,30(A)	89,40(A)	89,50(A)	89,50(A)

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

Instansi: Inspektorat Kabupaten Lamongan

No.	Indikator sasaran	Target	Lokasi	Kode Rek					Program/Kegiatan	Pagu Dana	Ket
1	Kapabilitas APIP	Level 3	Kab. Lamongan	6.01	35	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	352,655,026	
				6.01	35	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	267,718,670	
				6.01	35	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26,466,500	
				6.01	35	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	21,826,500	
				6.01	35	02	2.01	05	Pengawasan Desa	191,205,170	
				6.01	35	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	8,380,000	
				6.01	35	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	19,840,500	
				6.01	35	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	55,335,156	
				6.01	35	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27,910,600	
				6.01	35	02	2.02	02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	27,424,556	
2	Manajemen Resiko Indeks	2,9	Kab. Lamongan	6.01	35	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	29,601,200	
				6.01	35	02	2.02	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14,858,450	
				6.01	35	02	2.02	03	Reviu Laporan Kinerja	14,742,750	
3	Nilai Indeks Efektifitas	2,0	Kab. Lamongan	6.01	35	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	512,495,100	

	Pencegahan Korupsi			6.01	35	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	16,419,100	
				6.01	35	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	0	
				6.01	35	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	16,419,100	
				6.01	35	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	496,076,000	
				6.01	35	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	47,703,200	
				6.01	35	03	2.02	02	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	36,090,400	
				6.01	35	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	168,961,000	
				6.01	35	03	2.02	04	Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	243,321,400	
4	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	91,40	Inspektorat Kab. Lamongan	6.01	35	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,942,647,003	
				6.01	35	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	
				6.01	35	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	30,000,000	
				6.01	35	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja PD	20,000,000	
				6.01	35	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,600,205,803	
				6.01	35	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,560,205,803	
				6.01	35	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	20,000,000	
				6.01	35	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD	20,000,000	

6.01	35	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284,073,600	
6.01	35	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41,250,000	
6.01	35	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	242,823,600	
6.01	35	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	268,475,500	
6.01	35	01	2.06	01	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor	12,003,000	
6.01	35	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.256.600	
6.01	35	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000.000	
6.01	35	01	2.06	05	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	60,000,000	
6.01	35	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.000.000	
6.01	35	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103,215,900	
6.01	35	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539,866,000	
6.01	35	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,750,000	
6.01	35	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	175,076,000	
6.01	35	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361,040,000	
6.01	35	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,026,100	
6.01	35	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26,897,000	

				6.01	35	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	63,129,100	
				6.01	35	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000	
				6.01	35	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98,000,000	

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Nama OPD : Inspektorat Kabupaten Lamongan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
	Manajemen Resiko Indeks	Nilai	2,9	2,983	102,86%
	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	2,0	2,420	121%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Lamongan	Nilai	91,40	91,40	100%

NO	Program	Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	10.942.647.003	10.436.232.671	95,37
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	352.655.026	349.750.410	99,20%
3.	Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi	512.495.100	509.897.650	99,49%

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan sasaran indikator, dengan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.807.797.129 dan terealisasi sebesar Rp. 11.295.880.731 atau 95,66%, sisa dana sebesar Rp. 511.916.398 atau 4,33%, yang merupakan SILPA di kas Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KAB. LAMONGAN

- VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan
- MISI : "Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi"
- SASARAN : Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal"
- TUJUAN PD : Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
- TUGAS : Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan
- FUNGSI :
- a. penetapan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat ;
 - b. penetapan dan pengendalian Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
 - c. perumusan dan penetapan bahan kebijakan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan desa;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan reguler berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT;
 - e. penyelenggaraan pengujian terhadap laporan keuangan perangkat daerah;
 - f. penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;

- g. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. penyelenggaraan pembinaan tenaga fungsional/ pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan review laporan keuangan daerah sebelum dilakukan oleh BPK dan mengoordinasikan dan mereview Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah AKIP/LAKIP Pemerintah Daerah;
- j. penyelenggaraan pengawasan terhadap dana bantuan atas dasar permintaan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Inspektorat;
- l. pengendalian dan pengesahan laporan keuangan Inspektorat untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat	Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Enam elemen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Peran dan Layanan (Services and Role) 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management) 3. Praktik Profesional (Professional Practices) 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Renstra PD	Irban Wilayah I, II, III, Auditor dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

			(Performance Management and Accountability) 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture) 6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)		
	Manajemen Risiko Indeks	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Area Komponen yang dinilai yaitu: 1. Perencanaan 2. Kapabilitas 3. Hasil	Renstra PD	Irbn Wilayah I, II, III, Auditor dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
	Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi (IEPK)	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Penilaian terdiri dari pilar: 1. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi 2. Penerapan Strategi Pencegahan 3. Penanganan Kejadian Korupsi	Renstra PD	Irbn Investigasi dan Auditor
Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inpektorat Kab. Lamongan	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komonen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Renstra PD dan LKJIP	Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, serta Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	Level 3
		Manajemen Resiko Indeks	2,9
		Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	2,0
2.	Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat	91.40

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.942.647.003	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	352.655.026	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	512.495.100	APBD
	JUMLAH	11.807.797.129	APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola perencanaan, administrasi Keuangan, kepegawaian dan asset Inspektorat	Nilai SKM Inspektorat	84,00
2.	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	95%
3.	Meningkatnya tindak lanjut hasil Pengawasan Eksternal	Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK yang ditindaklanjuti	88%
4.	Meningkatnya tindak lanjut kebijakan di bidang pengawasan	Persentase kebijakan pengawasan yang dilegalitaskan	90%

	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	APBD
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.600.205.803	APBD
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284.073.600	APBD
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.475.500	APBD
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.866.000	APBD
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.026.100	APBD
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	297.319.870	APBD
8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	55.335.156	APBD
9.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	16.419.100	APBD
	JUMLAH	11.331.721.129	APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	95%
2	Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah I dan meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah I	95%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah I	95%
3.	Terwujudnya Pendampingan, tindak lanjut rekomendasi TP-TGR APIP dan BPK RI	Persentase Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti	90%
		Persentase Rekomendasi TP-TGR Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	80%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	95%
2	Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah I dan meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah I	95%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah I	95%
3.	Terwujudnya Pendampingan, tindak lanjut rekomendasi TP-TGR APIP dan BPK RI	Persentase Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti	90%
		Persentase Rekomendasi TP-TGR Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	80%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	95%
2	Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah III dan meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah III	95%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah III	95%
3.	Terwujudnya pendampingan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Persentase Rekomendasi Pemeriksaan Inspektorat Prov Jatim yang ditindaklanjuti	90%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan pada wilayah Investigasi	95%
2	Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah Investigasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah Investigasi	95%
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti pada wilayah Investigasi	80%
3	Meningkatnya perumusan kebijakan yang di legalitaskan	Persentase kebijakan yang dilegalitaskan	90%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN Rp	KET
1.	Kegiatan Penanganan Kerugian Negara/Daerah	27.910.600	APBD
2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	16.419.100	APBD
3.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	496.076.000	APBD
JUMLAH		540.405.700	APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kepegawaian	12 Laporan
2.	Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan persediaan barang	12 Laporan
3.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	100%
4.	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	KET
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.250.000	APBD
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	242.823.600	APBD
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.003.000	APBD
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.256.600	APBD
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000	APBD
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000	APBD
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.215.900	APBD
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.076.000	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.040.000	APBD
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.897.000	APBD
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.129.100	APBD
14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	APBD
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.000.000	APBD
JUMLAH		1.292.441.200	APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Perencanaan dan Kinerja	Jumlah Dokumen perencanaan, dan evaluasi Kinerja	8 Dokumen
2.	Terlaksananya tatakelola Keuangan yang baik	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	KET
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.560.205.803	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	APBD
JUMLAH		9.650.205.803	APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Program Kerja dan Bahan Koordinasi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Program Kerja yang tersedia	1 Dokumen
2.	Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	180 Laporan
3.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	20 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	KET
1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14.858.450	APBD
2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26.466.500	APBD
3.	Reviu Laporan Kinerja	14.742.750	APBD
4.	Reviu Laporan Keuangan	21.826.500	APBD
5.	Pengawasan Desa	191.205.170	APBD
6.	Kerjasama Pengawasan Internal	8.380.000	APBD
7.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	19.840.500	APBD
8.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	27.424.556	APBD
JUMLAH		324.744.426	APBD